



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

Kode Pos : 29432

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 06 /KPTS/170/I/2020

### TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemantauan Orang Asing;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  2. Keputusan Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 13 Januari 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemantauan Orang Asing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
  2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak-pihak yang terkait;
  3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi;
  4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 13 Januari 2020

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**

  
**MUHAMMAD KAMALUDDIN**

PARAF HIERARKHIS		
DEWAN	: ASPIL S.Sos	✓
KEBAG	: IMAM MUSLEM.	
KABBBAG	: AENUS BOY WSAUTO, H. I	✓

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMANTAUAN ORANG ASING**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	MUHAMMAD KAMALUDDIN	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3.	RUSLAN M ALI WASYIM, SH	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4.	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5.	UTUSAN SARUMAHA, SH	KETUA	F- PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6.	Drs. IDES MADRI, MM	WAKIL KETUA	F- PARTAI GOLKAR
7.	BUDI MARDIYANTO, SE., MM	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8.	THOMAS ARIHTA SEMBIRING, S.Sos	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9.	TAUFIK MUNTASIR	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
10.	LIK KHAI	ANGGOTA	F-PARTAI NasDem
11.	JIMMY NABABAN, SH	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
12.	HARMIDI UMAR HUSEN	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
13.	WERTON PANGGABEAN, SH., MH	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
14.	SITI NURLAILAH, ST., MT	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	MUHAMMAD SYAFEI, A.Md	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	EDWARD BRANDO, SH	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
17.	BIYANTO	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
18.	MUHAMMAD FADHLI	ANGGOTA	F- PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
19.	TAN A TIE	ANGGOTA	F- DEMOKRAT - PSI

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**



PARAF HIERARKHIS		
WAKIL KETUA I	: ASRI S.Sos	✓
WAKIL KETUA II	: IMAM MUSLIM	
WAKIL KETUA III	: AGUS EDY HSAUPH	✓